

Kolaborasi Stakeholders dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Sekolah

Hilwah Azzahro¹, Idea Facile Putri², Nur Aisyah Retno Wulan³, Hesti Kusumaningrum⁴

^{1, 2, 3, 4} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, JL. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten.
azzhrohilwaa@gmail.com

Abstract

In every education system, there is certainly an expectation for the success of the development of educational institutions. The responsibility for the education of a nation is not solely the task of the central government, but also the responsibility of local governments and every stakeholder involved. As key educational management elements, stakeholders have diverse roles and responsibilities. Stakeholders in improving the quality of school management consist of teachers, parents, school principals, school committees, and the government. All these aspects must then be considered, and an effective collaboration model and strategies must be chosen to improve school management's quality. The goal is to have a positive impact on the improvement of school management quality and to be able to face collaboration challenges as well as to find solutions to those challenges.

Keywords: Collaboration, Stakeholders, Management Quality

Abstrak

Dalam setiap pendidikan, tentu saja mengharapkan adanya keberhasilan atas berkembangnya lembaga pendidikan. Tanggung jawab pendidikan suatu bangsa tidak hanya tugas dari pemerintah pusat saja, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah dan juga tanggung jawab setiap stakeholders. Stakeholder, sebagai unsur kunci dalam manajemen pendidikan, memiliki peran dan tanggung jawab yang beragam. Stakeholders dalam meningkatkan kualitas manajemen sekolah terdiri dari guru, orangtua, kepala sekolah, komite sekolah, pemerintah. Seluruh aspek ini kemudian harus memilih model kolaborasi yang efektif dan strategi kolaborasi dalam meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Tujuannya agar berdampak baik terhadap peningkatan kualitas manajemen sekolah dan dapat menghadapi tantangan kolaborasi serta menemukan Solusi tantangan tersebut.

Kata kunci: Kolaborasi, Stakeholders, Kualitas Manajemen

Copyright (c) 2024 Hilwah Azzahro, Idea Facile Putri, Nur Aisyah Retno Wulan, Hesti Kusumaningrum

✉Corresponding author: Hilwah Azzahro

Email Address: azzhrohilwaa@gmail.com (Jl. Ir H. Juanda No.95, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangsel, Banten)

Received 06 December 2024, Accepted 12 December 2024, Published 18 December 2024

PENDAHULUAN

Dalam setiap pendidikan, tentu saja mengharapkan adanya keberhasilan atas berkembangnya lembaga pendidikan. Tanggung jawab pendidikan suatu bangsa tidak hanya tugas dari pemerintah pusat saja, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah dan juga tanggung jawab setiap stakeholders pendidikan, pemerintah bertanggung jawab dengan mengeluarkan regulasi atau aturan yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan, selanjutnya pendidikan juga menjadi tanggung jawab beberapa pihak yaitu pihak sekolah, orangtua, dan masyarakat atau instansi-instansi terkait yang berkepentingan. (Rujiah & Sa'diyah, 2021)

Stakeholder, sebagai unsur kunci dalam manajemen pendidikan, memiliki peran dan tanggung jawab yang beragam. Guru, sebagai agen langsung dalam proses pendidikan, harus mampu menyampaikan materi dengan metode yang tepat, merespons kebutuhan individual siswa, dan

memotivasi mereka untuk belajar. Kepala sekolah, sebagai pemimpin pendidikan, bertanggung jawab tidak hanya terhadap kelancaran operasional sekolah, tetapi juga terhadap menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan. (Jaenudin, 2024)

Menurut Muhammad Tholut, Stakeholder pendidikan dapat di artikan sebagai orang yang menjadi pemegang (pemangku) dan sekaligus pemberi dukungan terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan, stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, karena pada dasarnya stakeholder dalam pendidikan itu sendiri dibagi dalam tiga kategori utama yaitu: 1) Sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid dan tata usaha sekolah. 2) Pemerintah diwakili oleh para pengawas, penilik, dinas pendidikan, walikota, sampai menteri pendidikan nasional. 3) Masyarakat, sedangkan masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orangtua murid, pengamat dan lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga pendidik, took buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain

Sedangkan, Stakeholder dalam pendidikan islam adalah berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan sukses tidaknya proses pendidikan yang berlangsung. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah kepala sekolah, guru, wali murid, pemerintah, para tokoh dn masyarakat. (Sundari dan Eka Pharama, 2021)

Tren perkembangan Lembaga Pendidikan di Indonesia sedang mengalami dinamika yang signifikan. Setiap tahun, jumlah Lembaga Pendidikan terus bertambah, mencerminkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pendidikan. Namun, pertumbuhan ini seharusnya tidak hanya terfokus pada kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk masa depan individu, komunitas, serta dampaknya pada skala global. (Sumiati & Syaifudin, 2023) Oleh sebab itu, manajemen pendidikan memiliki perang yang sangat berpengaruh dalam melihat jalannya pendidikan yang efektif dan efisien, untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan yang memadai dan mampu mengoptimalkan kemampuan dan potensi setiap muridnya. Seingga, salah satu hal yang penting pertama adalah memastikan kualitas pendidikan sekolah mampu bersaing dalam mengembangkan setiap potensi pada lembaga pendidikan melalui manajemen pengelolaan yang solid untuk pendidikan sekolah berkualitas.

Beberapa hal yang menjadikan sebuah sistem pendidikan dianggap berhasil adalah adanya standardisasi dalam proses belajar maupun mengajar, memfokuskan pada proses dibandingkan hasil, kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan kehadiran profesional, serta memunculkan beragam visi pendidikan terutama dalam memberikan kesempatan anak untuk selalu belajar, kreativitas, dan kemanusiaan. Dan untuk menciptakan kondisi pendidikan yang baik itu, dibutuhkan seperangkat komponen yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Elemen-elemen tersebut meliputi keberadaan seorang kepala sekolah, keberadaan guru beserta kepribadiannya, dan juga peserta didik. (Ramdani, Amrullah, & Felisima Tae, 2019) Oleh sebab itu, dalam semua stakeholders haruslah bisa

mengkolaborasi peran masing-masing untuk dapat memenuhi manajemen pendidikan sekolah dengan kualitas yang baik.

Keikutsertaan peran *Stakeholders* dalam meningkatkan mutu sekolah dinilai sama pentingnya. Mengingat bahwa peran dari semua *stakeholders* sekolah sangat penting dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan karena lembaga pendidikan merupakan aset untuk mencetak generasi-generasi masa depan sebagai penerus dari tokoh-tokoh bangsa dimasa depan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan olehnya, masyarakat, bangsa dan negara. (Agustian, Amiruddin, & Isman, 2022)

Pengelolaan berbagai stakeholder Pendidikan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Karena dengan manajemen yang baik di segala lini Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi dunia Pendidikan. Hal tersebut, dapat dipengaruhi karena adanya kerja sama dan kolaborasi antara stakeholders dan para lembaga pendidikan. Untuk mencapai keberhasilan yang baik, diperlukan juga kerja sama dalam setiap manajemen pendidikan. Dalam hal ini, pembahasan akan merujuk kepada kolaborasi antara stakeholders guna meningkatkan kualitas manajemen pendidikan khususnya di sekolah.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan dan status fenomena menggunakan kata-kata maupun kalimat, yang kemudian dipisahkan berdasarkan kategori datanya untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan realitas empiris melalui fenomena secara jelas menyeluruh. (Purwono, dkk., 2019: 16-17) Bentuk penelitian ini menggunakan data primer berupa referensi, buku dan jurnal.

HASIL DAN DISKUSI

Stakeholders dalam Manajemen Sekolah

Guru dan Tenaga Pendidikan

Peran guru sebagai stakeholder dalam pendidikan meliputi beberapa hal: mereka berkomunikasi secara rutin dengan keluarga, yakni orang tua atau wali, mengenai perkembangan dan prestasi anak-anak dalam belajar; mereka bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah, mengajak mereka untuk masuk dan berpartisipasi di sekolah; menjelaskan kepada orang tua tujuan dan manfaat dari pendidikan sekolah bagi anak-anak mereka; mempersiapkan siswa

agar bisa berinteraksi dengan masyarakat melalui kurikulum, seperti kunjungan ke museum atau memperingati hari-hari besar keagamaan dan nasional. (Sumiati & Syaifudin, 2023)

Guru sebagai elemen kunci utama pendidikan semakin dituntut untuk beradaptasi dan bertanggung jawab atas hal-hal yang dialami peserta didik. Dan guru sebagai pengelola sekaligus agen dalam pembelajaran sejatinya memiliki kemampuan pedagogik. Salah satu indikatornya adalah guru tersebut mampu mengembangkan kurikulum dalam bentuk desain pembelajaran yang unggul, Inilah yang diharapkan sebagai guru profesional. menunjukkan begitu urgennya peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang telah disusun pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang lebih baik, sehingga dapat dikatakan guru adalah kunci sukses dalam sebuah program pendidikan. Sekaligus juga sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. (Sulaiman, W., 2022)

Profesionalisme sangat penting dalam lingkungan kerja, seperti halnya dalam lingkungan pendidikan. Guru merupakan pendidik profesional, karena profesi guru merupakan profesi yang kompetitif seperti profesi lainnya. Guru yang memiliki tingkat profesional tinggi dapat menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal tersebut akan mendorong kesadaran diri untuk meningkatkan kreativitas dalam menyajikan kegiatan pembelajaran yang bervariasi di kelas. (Ibnu Prayoga, Masruroh, & Vina Safitri, 2024)

Orang Tua dan Wali Murid

Peran orang tua sebagai stakeholder meliputi beberapa hal: mereka mendukung proses belajar-mengajar di sekolah, aktif dalam menyebarkan informasi tentang kegiatan sekolah di berbagai komunitas, siap menjadi narasumber berdasarkan keahlian dan profesi mereka, menyampaikan nilai-nilai positif dari kegiatan sekolah kepada masyarakat, dan berkolaborasi dengan anggota komite sekolah atau pihak lain dalam penyediaan sumber belajar. (Sumiati & Syaifudin, 2023)

Keterlibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran menjadi hal penting untuk mengembangkan karakter siswa melalui proses komunikasi yang ada. Komunikasi yang dibangun guru dengan orang tua siswa memerlukan berbagai upaya. Komunikasi awalnya akan terjalin dengan kesan yang dibangun oleh kedua belah pihak. Membangun kesan positif sehingga orang tua mempersepsi guru dengan baik. Persepsi adalah aktif dan bukan proses yang pasif, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap orang yang diajak berkomunikasi.

Ketika berkomunikasi dengan orang tua, guru menggunakan situasi informal agar lebih dapat membangun kedekatan. Komunikasi guru dengan orang tua siswa juga dilakukan di luar jam sekolah baik melalui jalur pribadi maupun melalui grup-grup di media sosial yang sengaja dibuat untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa. Dalam berkomunikasi yang harus dihindari adalah menggunakan stereotype, menyinggung masalah yang ada pada keluarga masing-masing. Menggunakan cara pandang sendiri yang sering tidak layak untuk disampaikan karena akan menyinggung lawan bicara. (Triwardhani Dkk, 2020)

Kepala Sekolah

Peran kepala sekolah sebagai stakeholder dalam pendidikan meliputi beberapa hal: mengelola hubungan antara sekolah dan orang tua siswa, menjaga hubungan yang baik dengan Komite Sekolah, serta menjalin dan memperluas kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga lain, baik yang berasal dari pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi sekolah melalui berbagai media komunikasi yang tersedia. (Sumiati & Syaifudin, 2023) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin formal suatu sekolah, kepala sekolah sedikitnya mampu berfungsi sebagai leader, motivator, inovator, supervisor, administrator, educator, dan manager.

Kepala sekolah bertanggung jawab pada perkembangan prestasi peserta didiknya, suasana lingkungan kerja guru, dan karakter keseluruhan sekolah. Kepala sekolah juga memegang peranan penting lain yaitu penghubung antara guru, orang tua, dan para stakeholder lainnya. Sebagai pemimpin pendidikan pula, kepala sekolah efektif mampu menunjukkan kemampuannya mengembangkan potensi-potensi sekolah, guru, dan siswa untuk mencapai prestasi maksimal. Kepemimpinan di sekolah dapat mencakup serangkaian kegiatan kepala sekolah dalam memimpin institusi sekolah dengan cara membangun teamwork yang kuat, mengelola tugas dan orang secara bertanggung jawab, dan melibatkan sejumlah pihak terkait dalam pelaksanaan visi sekolah. (Diat Prasajo, __)

Menurut Mada Sutapa (2006) Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif pada sekolah adalah memahami konsep hubungan antar personal (individu) warga sekolah dan masyarakat pendidikan (eksternal), karena seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dalam kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari lingkungan sosialnya, yaitu berinteraksi dan berkomunikasi dengan guru, pegawai TU, siswa, orang tua murid, masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait lainnya.

Komite Sekolah dan Badan Pengawas

Komite Sekolah adalah lembaga baru yang menggantikan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Fungsinya adalah sebagai wadah mandiri yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi manajemen pendidikan di setiap lembaga pendidikan, baik untuk pra-sekolah, pendidikan formal di sekolah, maupun pendidikan di luar lingkungan sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Dalam konteksnya, peran Komite Sekolah meliputi beberapa aspek: sebagai lembaga penasehat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan, sebagai pendukung baik dalam hal dukungan finansial, ide, maupun tenaga dalam menjalankan pendidikan di lembaga pendidikan, serta sebagai pengawas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan hasil pendidikan di lembaga tersebut. (Sumiati & Syaifudin, 2023)

Beberapa peran komite sekolah seperti berikut, Sebagai pemberi pertimbangan (*Advisoryagency*) adalah memberikan pertimbangan mengenai penetapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam hal sarana prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik. Peran

komite sekolah sebagai pendukung sumber daya meliputi pemantauan kondisi tenaga pendidikan di sekolah, pengerahan tenaga guru sukarela di sekolah, pengerahan tenaga non guru di sekolah. sekolah, dan pemantauan kondisi sarana dan prasarana di sekolah. Dan terakhir peran komite sekolah sebagai pengontrol adalah mengontrol perencanaan sekolah, yang meliputi pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah, penilaian kualitas kebijakan di sekolah, dan pengawasan proses perencanaan sekolah, perencanaan sekolah, pengawasan mutu perencanaan sekolah, dan pengawasan mutu program sekolah. (Mar'ati, 2022)

Pemerintah dan Lembaga Pendidikan

Peran pemerintah dalam sektor pendidikan diatur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (UUD). Melalui hasil amandemen Pasal 31 ayat 1-4, dinyatakan bahwa: setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan, seluruh warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya. Pemerintah juga diwajibkan untuk mengembangkan dan menjalankan sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta moralitas yang baik untuk membentuk kecerdasan bangsa, yang diatur melalui perundang-undangan. Negara harus memberikan prioritas anggaran untuk pendidikan, minimal dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (Sumiati & Syaifudin, 2023)

Pemerintah, diwakili oleh para pengawas, pemilik, dinas pendidikan, walikota, sampai menteri pendidikan nasional. Pemerintah, selaku pembuat kebijakan juga harus bersinergi dengan stakeholder lain. Peran pembuat kebijakan yaitu pelayan mediator antara aktor-aktor pendidikan lainnya, baik di tingkat daerah hingga pusat. Yang mana, setiap kebijakan yang mereka putuskan diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh stakeholder pendidikan lain serta mendukung kinerja antar stakeholder. (Sundari dan Eka Pharama, 2021) Melihat akan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang amat beragam, yang tidak kalah penting yaitu dukungan dan pengupayaan pemerintah dalam membantu meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Seperti halnya beberapa dukungan dan sokongan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab yang dapat dirasakan sampai sekarang ini.

Muhammad Fadhli berpendapat (2017) Beberapa ini tidak dapat dipungkiri, sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Misalnya peningkatan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, bantuan operasional sekolah (BOS), sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraannya, standarisasi dan akreditasi sekolah serta berbagai kebijakan lainnya. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana sampai pada guru-guru yang berkualitas. Selain penyediaan sarana dan sumberdaya manusia, peranan lainnya dari pemerintah yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bebas dari kepentingan, intervensi

serta hal-hal lainnya yang dapat mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu.

Model Kolaborasi Stakeholders

Model Kolaborasi Efektif

Terdapat beberapa model kolaborasi yang efektif dalam menerapkan kolaborasi stakeholders pada lembaga pendidikan. Seperti halnya model konsep Partisipasi Berbasis Masyarakat (*community based participation*) dan Manajemen Berbasis Sekolah/ MBS (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau stakeholder pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau stakeholder lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. (Rujiah & Sa'diyah, 2021)

Di Indonesia, mutu dalam pengertian absolut dapat kita lihat dari adanya beberapa sekolah unggulan, baik yang berasal dari sekolah yang berbasis masyarakat maupun sekolah yang diprakarsai oleh pemerintah. Beberapa sekolah yang "unggul", adalah sekolah-sekolah yang ingin tampil beda, dengan kekhasan yang tidak dimiliki sekolah lain. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, mutu dalam pengertian relatif (standar) diterapkan dengan mengacu pada sejumlah standar yang telah digunakan untuk melakukan pengecekan standar yang berkaitan dengan kinerja satuan pendidikan dan kelayakan pengelolaan satuan pendidikan, yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Akreditasi Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah adalah pola manajemen sekolah yang memberikan kontrol lebih besar kepada partisipan sekolah di tingkat lokal dalam hal ini mencakup kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, siswa, orang tua, dan masyarakat atas proses pendidikan dengan memberi mereka tanggung jawab untuk keputusan terkait pengelolaan anggaran, personel, dan kurikulum. (Nadeak, 2022:7)

Di Indonesia juga, sejumlah penelitian dengan berbagai setting telah dilakukan untuk melihat bagaimana dampak implementasi manajemen berbasis sekolah dalam kurikulum dan proses belajar mengajar. Hasilnya, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah secara signifikan berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa sejak tahun 2002. Hasil afirmatif ini semakin memicu minat di kalangan pendidik dan praktisi yang menyebabkan praktik manajemen berbasis sekolah diadopsi oleh lebih banyak negara. Model desentralisasi yang diterapkan oleh setiap pemerintah berbeda-beda namun tetap fokus pada peningkatan otonomi pemerintah daerah, dinas pendidikan kabupaten, dan sekolah. (Andriyan & Hery Yoenanto, 2022)

Strategi Kolaborasi dalam Manajemen Sekolah

Tentunya dalam membuat kolaborasi antara stakeholders berjalan baik, dibutuhkan komunikasi yang efektif. Dalam mengatur komunikasi membutuhkan strategi efektif Komunikasi yang terjadi di sekolah dilaksanakan baik komunikasi internal dalam sekolah, maupun komunikasi eksternal di luar

sekolah. Kepala sekolah menjadi salah satu kunci suksesnya kerja-kerja sebuah lembaga. Dalam hal ini seorang kepala sekolah harus dapat menjadi komunikator yang efektif sehingga dapat mendorong motivasi kerja para anggotanya. Di antara Komunikasi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah adalah terkait struktur dan fungsi organisasi, korelasi antara sesama anggota, kegiatan mengorganisasikan dan budaya organisasi.

Kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendengarkan, memahami, dan merespons masukan dari komunitas. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi partisipatif, di mana komunikasi yang dialogis dan interaktif menciptakan hubungan yang lebih demokratis. Dalam konteks pendidikan, hal ini menjadi sangat penting karena keputusan yang diambil oleh sekolah sering kali berdampak langsung pada berbagai pihak, terutama orang tua dan siswa. Kepala sekolah yang menggunakan strategi komunikasi partisipatif, seperti melibatkan orang tua, komite sekolah, dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan stakeholder eksternal. Penggunaan teknologi digital seperti media sosial dan aplikasi pesan juga memberikan kontribusi positif terhadap penyebaran informasi yang lebih cepat dan efisien. (Zahria, 2024)

Dalam setiap tahapan komunikasi antara stakeholders, tentunya tidak akan lepas dari perbedaan pendapat dan konflik. Untuk mengatur dan membatasi hal tersebut, diperlukan teknik pengelolaan konflik yang baik. Konflik sering kali muncul karena ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab. Penyelesaian konflik dalam tim kerja merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap anggota tim dan pemimpin. (Kartika, dkk, 2024) Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menangani konflik dalam tim kerja: 1. Komunikasi Terbuka : Membuka saluran komunikasi yang jujur dan terbuka antara semua anggota tim adalah langkah pertama yang penting dalam penyelesaian konflik. 2. Mendengarkan dengan Empati : Mendengarkan secara aktif dan dengan empati adalah keterampilan penting dalam menangani konflik. 3. Negosiasi : Menggunakan teknik negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak adalah langkah penting dalam penyelesaian konflik. 4. Kolaborasi : Menggalang kolaborasi antara anggota tim untuk mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak adalah pendekatan yang efektif dalam menangani konflik

Menurut ahmad muslim berpendapat (2014) Pengelolaan konflik yang tepat dan benar dapat diketahui melalui beberapa kemampuan antara lain kemampuan membuat perencanaan analisis konflik, kemampuan mengevaluasi konflik, dan kemampuan memilih strategi manajemen konflik. Keberhasilan pemimpin pendidikan dalam memilih strategi manajemen konflik yang tepat sangat ditentukan oleh kemampuan, keberanian, pengalaman, usaha, dan doa, kematangan dirinya, serta situasi dan kondisi yang ada. Selain itu, kepedulian pimpinan terhadap prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam manajemen konflik juga sangat menentukan keberhasilan langkah ini.

Dampak Kolaborasi terhadap Kualitas Manajemen Sekolah

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kolaborasi antar stakeholders dalam Pendidikan tentunya akan meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Contoh sederhana adalah keterlibatan orang tua dalam proses Pendidikan. Orang tua merupakan sosok penting bagi siswa, orang tua adalah guru bagi siswa diluar Pendidikan formal. Pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa hendaknya dibantu dan dipantau oleh orang tua. Tanpa pantauan, siswa tersebut boleh jadi lalai terhadap tugasnya. Hal itu tentu tidak baik dalam proses Pendidikan, karena seorang siswa diharapkan dapat tanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan padanya. Maka dukungan dari sekolah dan keluarga dalam proses Pendidikan dapat memengaruhi hasil belajar siswa.

Tak hanya kolaborasi dengan keluarga, namun juga lingkungan yang ada disekitar, seperti guru itu sendiri, siswa, Masyarakat juga administrator. Lingkungan yang memberikan dukungan dalam proses pembelajaran akan lebih baik diterima oleh siswa. Maka dari itu, kolaborasi antar stakeholders dapat meningkatkan kualitas Pendidikan. Selain itu, Kerjasama yang baik akan menghadirkan manajemen Pendidikan sekolah yang baik pula.

Adapun Sekolah dapat menjadi penggerak proses Pendidikan yang baik dengan beberapa program yang merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak yakni

1. Kemendikbud dengan Pemerintah Daerah berkolaborasi di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama,
2. Mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemerintah Daerah Intervensi yang dilakukan secara holistik,
3. Seluruh kondisi sekolah, memiliki ruang lingkup tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta,
4. Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri, dan
5. Terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak (Patilima, 2022: 233).

Pengembangan Profesional dan Motivasi

Kolaborasi stakeholders memberi kesempatan melibatkan banya guru dapat menyelesaikan suatu masalah Pendidikan yang cukup kompleks. Kolaborasi dapat meningkatkan pengetahuan guru dan menumbuhkan profesionalitas seorang guru. Hal ini kemudian akan memengaruhi pengembangan sekolah juga. Kolaborasi adalah sarana untuk mengingatkan peran, meningkatkan bahan ajar, praktik mengajar serta berinteraksi dengan siswa bagi para guru. Maka kolaborasi yang efektif akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru, karena sebelumnya para guru berbagi pengalaman dan Solusi dalam masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran.(Kasmawati, 2020: 137)

Kegiatan kolaborasi dilakukan untuk menentukan tujuan Bersama dengan melibatkan orang laun, yang kemudian berbagi tanggung jawab serta bekerja sama agar dapat mencapai hal yang lebih

dari capaian yang dilakukan secara mandiri. Kolaborasi guru dalam rangka pengembangan profesional guru memiliki beberapa bentuk utama yaitu, komunitas praktik, kelompok studi Pelajaran, desain tim guru dan komunitas pembelajaran profesional. Dalam hal ini guru akan saling menceritakan atau bertukar pengalaman, kemudian saling memberikan timbal balik. Interaksi ini akan memberikan ketersediaan bantuan atau bantuan timbal balik. Lalu juga menyampaikan metode dan bahan materi yang berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran. Setelah itu guru akan saling bekerjasama dan merasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya. (Kasmawati, 2020: 138)

Maka tentu, kolaborasi stakeholders khususnya antar guru, dapat meningkatkan motivasi guru tersebut dalam proses pembelajaran. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, hal ini akan berdampak ke sekolah dan juga siswa itu sendiri.

Tantangan dan Solusi dalam Kolaborasi Stakeholders

Tantangan Umum

Tantangan yang mungkin terjadi dalam kolaborasi stakeholders tentu bersumber dari individu itu sendiri. Berikut ini merupakan tantangan umum kolaborasi: (Hidayat & Wijaya, 2017: 203-204)

1. Ketergantungan satu kelompok dengan kelompok lainnya, atau individu dengan individu lainnya. (Interdependensi tugas). Hal ini dapat menghambat pihak lainnya, karena seluruh pihak saling berhubungan. Ketergantungan dapat terjadi karena beberapa hal, entah pihak tersebut tidak bertanggung jawab, ataupun tidak memahami tugasnya dengan baik.
2. Tantangan status atau persaingan antar pihak. Manusia tentu memiliki sifat kompetitif, namun terkadang ketika memiliki status tinggi, manusia saling merendahkan. Hal ini boleh jadi disebabkan pihak tersebut ingin meningkatkan statusnya dan merasa terancam posisi maupun statusnya terambil.
3. Perbedaan tujuan. Kolaborasi dilakukan untuk mencapai tujuan Bersama, namun dalam pengimplementasiannya, seringkali beberapa pihak memiliki tujuan yang melenceng. Hal ini dapat terjadi karena harapan pihak lain yang lebih tinggi dan tidak adanya transparansi keinginan antar pihak.

Solusi Tantangan Kolaborasi Stakeholders

Dalam hal manajemen modern, tantangan atau konflik bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Maka dalam hal ini Solusi harus dicari, dan sejalan dengan manajemen yang baik, konflik dapat bersifat produktif. Hal ini digambarkan Allah dalam Surat Al Insyiraah/94: 5-6, yang menyampaikan bahwa dibalik berbagai permasalahan terdapat sebuah kemudahan. (Hidayat & Wijaya, 2017: 200)

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

Artinya: “Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

Kolaborasi merupakan bentuk Kerjasama untuk mencapai tujuan Bersama. Maka hubungan antar individu maupun kelompok tentunya harus baik. Hubungan tersebut harus memiliki timbal balik, pengembangan juga pembagian wewenang dan tanggung jawab harus secara adil agar mencapai kesejahteraan Bersama. Dalam hal ini, kolaborasi harus memiliki komunikasi yang baik, agar hubungan tersebut tidak rusak. Komunikasi dilakukan secara terbuka atau transparan, hal ini untuk membangun kepercayaan antar individu, sehingga tidak menyebabkan perpecahan antar pihak. Selain itu, komunikasi yang terbuka dapat mengatasi masalah yang ada, karena tidak ada yang merahasiakan atau menutup-nutupi masalah tersebut yang berpotensi menjadi masalah lebih berat dikemudian hari.

Komunikasi dalam berkolaborasi harus dilakukan secara jelas dan teratur, kepada setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi tanpa terkecuali. Tujuannya, agar semua pihak yang berkolaborasi dapat saling terhubung serta memperoleh dan memahami tugasnya masing-masing dengan baik. Selain itu komunikasi yang baik dapat meningkatkan rasa tanggung jawab tiap pihak, dan dapat membantu bekerjasama dengan baik. (Wijaya & Rifa'I, 2016: 153)

Selain komunikasi, membangun sikap saling menghargai merupakan Solusi bagi masalah-masalah kolaborasi ini. Sikap ini meminimalisir adanya pihak yang disingkirkan, maupun perpecahan. Sikap menghargai dan menghormati adalah sikap yang mengesampingkan ego, proses kerja sama yang dijalin akan mengedepankan keterampilan dan peran yang dimiliki, bukan pada aspek subjektif lainnya. (Sentanu, 2024: 5)

KESIMPULAN

Dalam setiap pendidikan, tentu saja mengharapkan adanya keberhasilan atas berkembangnya lembaga pendidikan. Tanggung jawab pendidikan suatu bangsa tidak hanya tugas dari pemerintah pusat saja, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah dan juga tanggung jawab setiap stakeholders pendidikan, pemerintah bertanggung jawab dengan mengeluarkan regulasi atau aturan yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan, selanjutnya pendidikan juga menjadi tanggung jawab beberapa pihak yaitu pihak sekolah, orangtua, dan masyarakat atau instansi-instansi terkait yang berkepentingan.

Di Indonesia, tren perkembangan lembaga pendidikan sedang mengalami dinamika yang signifikan. Jumlah lembaga pendidikan terus meningkat setiap tahun, menunjukkan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang meningkat. Oleh sebab itu, manajemen pendidikan memiliki perang yang sangat berpengaruh dalam melihat jalannya pendidikan yang efektif dan efisien, untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan yang memadai dan mampu mengoptimalkan kemampuan dan potensi setiap muridnya. Sehingga, salah satu hal yang penting pertama adalah memastikan kualitas pendidikan sekolah mampu bersaing dalam mengembangkan setiap potensi pada lembaga pendidikan melalui manajemen pengelolaan yang solid untuk pendidikan sekolah berkualitas.

Stakeholders dalam manajemen Pendidikan terdiri dari beberapa pihak salah satunya, guru yang diharuskan untuk menyesuaikan diri dan bertanggung jawab atas apa yang dialami siswa mereka. Guru adalah kunci keberhasilan program pendidikan. Kemudian, orang tua, perlu terlibat dalam kegiatan pembelajaran sangat penting untuk membangun karakter siswa melalui komunikasi yang ada. Komunikasi guru dengan orang tua siswa membutuhkan banyak upaya. Di luar waktu kelas, guru dan orang tua siswa berkomunikasi satu sama lain baik secara pribadi maupun melalui grup-grup di media sosial. Lalu peran kepala sekolah sebagai stakeholder dalam pendidikan meliputi beberapa hal: mengelola hubungan antara sekolah dan orang tua siswa, menjaga hubungan yang baik dengan Komite Sekolah, yang merupakan lembaga baru yang menggantikan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan dan sebagai wadah mandiri yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi manajemen pendidikan Selanjutnya Peran pemerintah dalam sektor pendidikan diatur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah diwajibkan untuk mengembangkan dan menjalankan sistem pendidikan nasional. Negara harus memberikan prioritas anggaran untuk pendidikan, minimal dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ada banyak model kolaborasi yang bekerja dengan baik untuk menerapkan kolaborasi stakeholder di lembaga pendidikan. Seperti halnya model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Partisipasi Berbasis Masyarakat, yang saat ini tidak hanya menjadi wacana tetapi juga mulai diterapkan di Indonesia. Di Indonesia, ada banyak sekolah unggulan, baik yang diprakarsai pemerintah maupun yang berbasis masyarakat. Untuk memastikan bahwa kolaborasi antara stakeholder berjalan dengan baik, komunikasi yang efektif sangat penting. Kepala sekolah bukan hanya orang yang memberi tahu orang lain; mereka juga mendengarkan, memahami, dan merespons kritik dari komunitas.

Dampak Kolaborasi terhadap Kualitas Manajemen Sekolah: Kolaborasi antar pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan pasti akan meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Orang tua harus membantu dan memantau pekerjaan rumah siswa. Ini pasti merugikan proses pendidikan karena seorang siswa diharapkan dapat bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepadanya. Untuk meningkatkan pengetahuan guru dan meningkatkan profesionalitas mereka, kolaborasi adalah cara untuk mengingatkan peran, meningkatkan bahan ajar, praktik mengajar, dan berinteraksi dengan siswa. Tantangan yang mungkin terjadi dalam kolaborasi stakeholders tentu bersumber dari individu itu sendiri. Kolaborasi dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, namun dalam pengimplementasiannya, seringkali beberapa pihak memiliki tujuan yang melenceng. Dalam hal manajemen modern, tantangan atau konflik bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Maka dalam hal ini Solusi harus dicari, dan sejalan dengan manajemen yang baik, konflik dapat bersifat produktif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus juga kami sampaikan dan kami sangat menghargai dukungan dari Ibu Dr. Hesti Kusumaningrum, S.Kom, M.Pd., dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan, serta kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas fasilitas yang disediakan. Kami juga sangat berterima kasih kepada para peserta penelitian dan rekan-rekan sejawat atas masukan yang konstruktif. Dukungan dari keluarga kami juga tidak kalah pentingnya dan sangat kami hargai. Semoga artikel ini memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan manajemen pendidikan dan penjaminan mutu.

REFERENSI

- Agustian, R., Amiruddin, Isman, M., (2022). Keterlibatan Stakeholders Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman: HIJRI*. 2022
- Andriyan, A., & Yoenanto, N. H. (2022). Optimalisasi penerapan dan pengelolaan manajemen berbasis sekolah: literature review. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 14-27
- Fadhli, M. (2017). Manajemen peningkatan mutu pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215-240.
- Hidayat, R., & Wijaya, C., (2017). *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Ibnu Prayoga, F., Masruroh, N., & Vina Safitri, N., (2024). Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal UNS: Social, Humanities and Education Studies (SHEs)*, 7(3). 2024
- Jaenudin, (2024). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Sekolah: Perspektif Pendidikan. *Journal of Education Research*, 5(1), 2024
- Kartika, Ananda Pratiwi, D., Dwi Maharani, A., Herlina, Wijaya, M., A., (2024). Mengelola Konflik dalam tim kerja dengan strategi dan pendekatan yang efektif. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(3), 2024
- Kasmawati, Y (2020). Peningkatan Kompetensi Melalui Kolaborasi: Suatu Tinjauan Teoritis Terhadap Guru. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, [journal.unismuh.ac.id, https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3377](https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3377)
- Mar'ati, A., (2022). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(2), 2022
- Nadeak, Bernadetha, (2022). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, (September, 2022)
- Patilima, S (2022). Sekolah Penggerak sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, [ejurnal.pps.ung.ac.id, https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/psnpd/article/view/1069](https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/psnpd/article/view/1069)

- Purwono, FH, Ulya, AU, Purnasari, N, & Juniarmoko, R (2019). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method)*., books.google.com, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PthMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=metode+penelitian+kombinasi+mix+methods&ots=6bLENPe584&sig=D6F3Nk_p_WgF5Ys_u3kE2tYKSNM
- Ramdani, Z., Amrullah, S., & Felisima Tae, L., (2019). Pentingnya Kolaborasi dalam Menciptakan Sistem Pendidikan yang Berkualitas. *Jurnal MEDIAPSI*, 5(1), 2019
- Rujiah, Sa'diyah, M., (2021). Peran Stakeholder Pendidikan Sebagai Penjamin Mutu Sekolah PAUD di TKQ Baitul Izzah. *Jurnal Ilmu Islam: Rayah Al-Islam*, 5(2), 2021
- Sentanu, IGEPS, Yustiari, SH, & AP, MPA S (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*., books.google.com, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=pV8QEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hamabatan+yang+sering+dihadapi+dalam+kolaborasi+stakeholders+seperti+komunikasi+yang+kurang+efektif+atau+perbedaan+prioritas&ots=PP35DC146Z&sig=UE9Qctih5am2nS6B496QZXaK5WQ>
- Sulaiman, W., (2022). Pengembangan Kurikulum: (Sebagai Peran Guru Profesional). Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(3), 2022
- Sumiati, Syaifudin, M., (2023). Mengelola Berbagai Stakeholder Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 2023
- Sundari, Eka Pharama, T., (2021). Stakeholder Dalam Pendidikan. *Jurnal: At-Tazakki*, 5(2), 2021
- Teknik Delphi (uny.ac.id)
- Triwardhani, I., J., Trigartanti, W., Rachmawati, I., & Pratama Putra, R., (2020). Strategi Guru dalam Membangun komunikasi dengan Orang tua Siswa di Sekolah. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 2020
- Wijaya, C., & Rifa'I, M., (2016). *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing.
- Zahria, I., (2024). Komunikasi Partisipatif Kepala Sekolah dalam Menghubungkan Kolaborasi dengan Komunitas dan Stakeholders. *Communicator: Journal of Communication*, 1(1), 2024